

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum dan Sistem Hukum Waris di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian terkecil dalam hukum keluarga, berikut akan membahas hukum waris secara spesifik. Adapun pengertian waris dari berbagai ahli hukum di Indonesia seperti :

a. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa :

*“Warisan adalah terkait apakah hak-hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.”*¹⁰

b. Soepomo juga memberikan pengertian bahwa :

*“Hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang memuat aturan proses dalam pengoperan barang-barang harta benda dan benda tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”*¹¹

c. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa :

“Pengertian dari hukum warisan yaitu hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban orang yang

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage), hal. 8.

¹¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), hal. 72.

telah meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup seperti dalam harta benda seseorang yang diwariskan”¹²

d. Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 171 huruf (a) yang berbunyi :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Pada bunyi pasal di atas dapat diartikan hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur siapakah pewarisnya;
2. Ketentuan yang mengatur siapakah ahli warisnya;
3. Ketentuan yang mengatur apa saja harta yang ditinggalkan;
4. Ketentuan yang mengatur terkait akibat dari peralihan harta peninggalan dari pewarisnya kepada ahli warisnya; dan
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian untuk masing-masing ahli warisnya.

Hukum waris telah ada sejak abad ke-7 hingga saat ini, menurut teori itu sendiri, hukum waris Islam tidak akan mengalami perubahan sama sekali karena hukum tersebut dianggap sebagai hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa. Para *fuqaha* juga berpendapat bahwa, hukum Islam dan hukum-hukum lainnya dianggap

¹² R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari* (Yogyakarta : Hien Hoo Sing, 1964), hal. 8.

sebagai perintah Allah SWT. yang harus dilaksanakan tanpa ada yang merubah sedikit pun aturan tersebut, sehingga hukum tersebut diistilahkan dengan hukum *ta'abbudi* (wajib diikuti sebagai ibadah/kepatuhan terhadap Allah SWT.), bukan hukum *ta'aqulli* yang mana hukum tersebut merupakan hukum yang dapat berubah kapan saja sesuai dengan perkembangan sosial dan masyarakatnya.¹³

Dalam masa pembaharuan hukum waris Islam di negara Indonesia, yang dikodifikasikan ke bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), di dalamnya terdapat di antaranya hukum waris, perkawinan dan wakaf, yang merupakan hukum realistik karena di negara Indonesia terdapat pengaruh di berbagai hukum adat-istiadat sehingga berpengaruh pada munculnya keadilan masyarakat. Dapat diketahui terdapat pokok-pokok di hukum waris Islam (KHI) seperti :

- a. Mengedepankan sistem keluarga inti, dimana keluarga menyamping tidak dapat mewaris selama masih ada anak pewaris;
- b. Mendudukan wanita setara dengan laki-laki, sehingga KHI tidak mengenal lembaga *dzawil arham*; dan
- c. Menghormati anak angkat sebagai bagian keluarga yang harus mendapat wasiat wajibah walaupun bukan sebagai ahli waris.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya berlaku untuk seluruh warga negara di Indonesia. Corak dalam suatu negara

¹³ *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI , 2012), hal. 59.

atau daerah memberikan pengaruh atas hukum kewarisan pada daerah itu, hal tersebut dikarenakan :

- a. Pada dasarnya telah diketahui bahwa waris dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terdapat suatu kemungkinan kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi, namun dalam praktisnya masih ada permasalahan-permasalahan yang sudah sangat jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.
- b. Seperti kita ketahui, dalam ilmu hukum termasuk salah satunya hukum Islam yang terdapat juga di dalamnya hukum waris adalah tergolong hukum sosial dan bukan ilmu eksak. Sehingga hukum waris merupakan tempat yang sering terjadinya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama dalam penafsiran ayat-ayat yang menimbulkan berbagai macam penafsiran yang lebih dari satu.¹⁴

2. Hukum serta Sistem Hukum Waris di Indonesia

Bentuk dan sistem-sistem dalam hukum waris sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan sifat dari kekeluargaan. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia sendiri berpusat pada garis keturunannya.

- a. Hukum Waris yang Berlaku Bagi Warga Negara di Indonesia.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara dan Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal. 6.

- 1) Warga negara Indonesia yang asli menggunakan aturan hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing yang mendekati 3 (tiga) sifat atau sistem keluarga seperti sifat kebapak-an (patrilineal), keibuan (matrilineal), dan kebapak-ibuan (bilateral atau parental).
 - 2) Untuk warga Indonesia beragama Islam, pada realitanya berpengaruh pada hukum Islam terkait peraturan waris.
 - 3) Bagi masyarakat Arab, diberlakukan aturan hukum Islam secara menyeluruh.
 - 4) Kemudian bagi masyarakat Tionghoa serta Eropa diberlakukan aturan BW (*Burgerlijk Wetboek*) pada Buku II *title 12-18*, Pasal 830-1130)¹⁵
- b. Sistem Pembagian Hukum Waris di Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki berbagai macam sistem keturunan, tentunya dengan sifat-sifat kekeluargaan yang unik dipengaruhi dengan perkembangannya zaman yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang mencolok. Berikut penjelasannya yang akan dipaparkan di bawah ini :

1) Sistem Patrilineal/Sifat Kebapak an¹⁶

Sistem ini merupakan garis keturunan yang berasal dari ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Contoh

¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pmebaharuan Hukum Positif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 41.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 83.

masyarakatnya: Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

2) Sistem Matrilineal/Sifat Keibu an.

Sistem ini kebalikan dari sistem patrilineal yang mana garis keturunannya dari ibu hingga ke atas sampai ke nenek moyang perempuan. Contoh masyarakatnya: kekeluargaan ini hanya ada di satu daerah di Indonesia yaitu Minangkabau.

3) Sistem Bilateral atau Parental /Sifat Kebapak Ibuan.

Dalam sistem ini, pada hakikatnya tidak ada perbedaan baik dari pihak ibu maupun ayah. Contoh masyarakatnya: Jawa, Madura, Sumatera Bagian Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.¹⁷

Setelah melihat berbagai perbedaan-perbedaan di atas terkait sistem pembagian waris dalam masyarakat Indonesia, dapat dipahami bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih sangat terlihat ada dan bahkan akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, terutama dalam hukum waris di Indonesia itu sendiri.

Sehingga dalam waris Indonesia menimbulkan berbagai perbedaan dalam sistem hukum waris yang bercorak dan memiliki sifat yang berbeda juga yaitu hukum waris Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hal. 10.

hukum waris barat peninggalan zaman Belanda yang bersumber pada KUHPerdota.

B. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Hukum Islam merupakan hukum yang tercipta berdasarkan pemahaman-pemahaman manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan manusia dan berlaku secara universal dan relevan untuk setiap zaman. Dalam hukum ini, dijadikan sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yaitu agama yang ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku untuk semua umat Islam dimanapun, kapanpun dan untuk kebangsaan apapun.

Adapun beberapa ayat suci Al-Qur'an yang terkait dengan hukum waris sekaligus menjadi dasar hukum mewarisi yaitu terdapat dalam surah An-Nisaa :

a. Surah An-Nisaa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Pada penjelasan di atas bahwa Allah menyebutkan secara tegas baik laki-laki ataupun perempuan, masing-masing berhak mendapatkan warisan.

b. Surah An-Nisaa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seseorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untunk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia itu meninggal mempunyai anak; jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c. Surah An-Nisaa Ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Pada ayat di atas sangat jelas bahwa baik janda maupun duda tetap mendapatkan bagiannya yang dibagi secara tegas.

d. Surah An-Nisaa Ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ
 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

e. Surah An-Nisaa Ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الذَّكْرَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam penguraian pada hukum waris Islam, sumber tertinggi pada kaitan hukum waris Islam adalah Al-Qur'an disertakan dengan pelengkap seperti As-sunnah.

2. Hukum Waris dalam Hadist

- a. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بُضْ بَأَهْلِهِأَفَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ وَسَلَّم قَالَ: الْحَقُّوَالْفَرَا
ذَكَرٍ(رواه البخاري)

“Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”¹⁸

¹⁸ Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy, Juz IV*, (Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy,tt), hal. 181.

- b. عَنْ عَمْرِانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَحُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُّ
سُ (رواه أبو داود)

*“Dari Umron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata : “Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya” Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam”.*¹⁹

- c. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قُلُوقًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَأَوَارِثَ لَهُ (رواه الترمذي)

*“Dari ‘Amr bin Muslim dari Thawus, dari Aisyah yang berkata:” Bersabda Rasulullah SAW: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya”.*²⁰

3. Sistem Pembagian Waris dalam Masyarakat Arab Sebelum Islam

Pada sistem kewarisan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, yaitu perkembangan yang berasal dari perbaikan-perbaikan prinsip hukum waris yang telah berlaku di negeri Arab sebelum masuknya Islam dengan menggunakan sistem patrilineal dalam kekeluargaannya. Sehingga ada beberapa sistem yang menjadi pokok utama dalam hukum waris di masyarakat arab sebelum Islam, yaitu :

- a. Anggota keluarga yang paling pertama dan paling berhak mendapatkan warisan adalah laki-laki dari pihak bapak yang paling terdekat (*ashabah*);

¹⁹ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud, Juz. II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hal. 108.

²⁰ Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih, Juz IV*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), hal. 32.

- b. Anggota keluarga pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan; dan
- c. Untuk anak, cucu, canggah dan lainnya, hanya berhak mendapatkan warisan dari leluhur pewaris seperti ayah, kakak maupun buyutnya.²¹

Setelah Islam telah datang, Al-Qur'an pun membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga sistem kewarisan di atas, sehingga pokok-pokok hukum waris Islam yang menjadi inti dalam pembagian waris terdapat pada Al-Qur'an yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat : 7, 11, 12, 33 dan 76.

4. Ahli Waris Hukum Islam

Telah kita ketahui bahwa ahli waris merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari peninggalan seseorang. Dalam Islam sendiri, ada beberapa golongan ahli waris yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Ahli waris yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' hal ini disebut *dzawil furudh*.²²
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis keturunan laki-laki seperti ayah, kakek, saudara laki-laki dan lain sebagainya, disebut *ashabah*.²³

²¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 31.

²² Ibid, hal. 67.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), hal. 437.

- c. Ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ibu yang tidak termasuk dalam golongan *dzawil furudh* dan *ashabah* disebut *dzawil arhaam*.²⁴

5. Ahli Waris yang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan Dalam Islam

Dalam pewarisan tentunya ada beberapa pihak yang tidak berhak atau tidak patut untuk mendapatkan warisan dari pewaris di antaranya yaitu :

- a. Ahli waris yang telah membunuh pewaris itu sendiri, tentunya tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang telah dibunuhnya apalagi keluarga sendiri;
- b. Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, begitu pula dengan sebaliknya; dan
- c. Ahli waris yang kafir tidak berhak atau tidak patut mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Apabila yang termasuk dalam golongan seperti yang disebutkan di atas, dan telah berpura-pura menguasai harta warisan baik secara sebagian ataupun seluruhnya, maka orang tersebut wajib untuk mengembalikan harta yang telah dikuasainya.

²⁴ Ibid, hal. 446.

Berikut adalah tabel pembagian waris untuk para ahli waris dalam Islam:

(Tabel Pembagian Waris Islam)²⁵

TABEL PEMBAGIAN WARIS ISLAM (ILMU FAROIDL)

KETERANGAN :

1. Tabel ini berdasarkan al-Qur'an surat Annisa ayat : 11, 12 dan 176, hadits-hadits shoheh tentang mawaris, serta Syarah Rohbiyah oleh Umar Al-Baqri

2. Kotak-kotak yang berisi dua angka menunjukkan bahwa angka yang berada dibawah adalah bagian ahli waris yang tertulis disamping kirinya. Sedangkan angka yang diatasnya adalah bagian ahli waris yang tertulis pada kolom diatas lajur tersebut.

3. Kewarisan kakek dan saudara berdasarkan pendapat Umar bin Khotob dan Zaid bin Tsabit

4. A = Ashobah Binnafsi
AB = Ashobah Bilghoer
AM = Ashobah Ma'alghoer
0 = Mahjub

5. Ashobah = semua harta atau sisa

6. Pada ketika ahli waris hanya terdiri dari Suami, Ibu dan Bapak atau istri Ibu dan Bapak, maka bagian Ibu sepertiga dari sisa. Sisa Suami atau sisa Istri.

1. Anak laki-laki	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

²⁵ www.andirahmaan.blogspot.com , diakses tanggal 22 November 2018.

C. Hukum Waris Menurut Hukum Positif

1. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum waris yang berdasar pada aturan KHI, Buku ke II tentang hukum kewarisan.

a. Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KHI

KHI merupakan sekumpulan aturan-aturan hukum yang berisi dari berbagai pasal dan terdapat 3 (tiga) kelompok pada materi-materinya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan (hibah dan wasiat) serta hukum perwakafan.

KHI dibentuk oleh para tokoh yang begitu peduli terhadap dilaksanakannya hukum Islam Indonesia dan tentunya bertujuan untuk menjadi aturan undang-undang yang berkekuatan tetap sehingga menjadi pegangan demi tercapainya pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Hingga munculnya atau diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tepatnya pada 10 Juni/1991. Setelah diterbitkan aturan tersebut, Presiden menginstruksikan menteri agama untuk menyampaikan KHI tersebut agar digunakan oleh pemerintah serta masyarakat yang memerlukan.²⁶

Dalam aturan hukum kewarisan terdapat pada Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 171-228 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Hal.62

b. Sistem Hukum Waris Dalam KHI

Pada sistem hukum waris berdasarkan KHI, dapat dilihat pada isi Pasal 171,175,188,191 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Pasal 171: dijelaskan berbagai ketentuan dalam waris. Pada pasal ini menjelaskan pengertian-pengertian dari hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah dan baitul maal.
- 2) Pasal 175: menjelaskan bagaimana ketentuan dari ahli waris terhadap pewaris seperti mengurus serta menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai dan lain sebagainya.
- 3) Pasal 188: menjelaskan bahwa para ahli waris dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama jika tidak menyetujuan pembagian harta warisan.
- 4) Pasal 191: menjelaskan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris atau tidak jelas keberadaannya, maka warisan tersebut diserahkan kepada Baitul Maal berdasar pada Putusan Pengadilan Agama demi kepentingan kesejahteraan umum.²⁷

Terkait penyelesaian masalah waris, berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan, memutus serta memeriksa perkara pada tingkat pertama antara umat beragama Islam.

²⁷ Isi Rangkuman Kompilasi Hukum Islam Bab II Hukum Kewarisan Ketentuan Umum Pasal 171, 175,188,191.

c. Ahli Waris Dalam KHI

Berdasar pada Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang pada intinya mengatakan bahwa, pengelompokan ahli waris dalam KHI yaitu:

1) Berdasarkan pada hubungan darah

Golongan laki-laki seperti ayah, kakek, anak laki-laki, paman, serta saudara laki-laki.

2) Adanya hubungan perkawinan yaitu janda atau duda.²⁸

d. Ahli Waris yang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan Menurut KHI

Setelah lahirnya KHI dari eksistensi Peradilan Agama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasar pada Bab II tentang ahli waris Pasal 173 yang pada intinya menjelaskan bahwa :

1) Ahli waris yang pernah atau telah membunuh pewaris

2) Telah melakukan fitnah terhadap pewaris yang mengatakan bahwa telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun bahkan lebih.

adapun penjelasan lain yang terkait tentang perbedaan agama, namun tidak dijelaskan secara rinci, hanya menjelaskan secara bahwa ahli waris harus beragama Islam.²⁹

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 174*.

²⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Hal.78.

E. Tinjauan tentang Sistem Kekeluargaan

1. Pengertian dan Macam-Macam Anak dalam Keluarga.

a. Pengertian Anak dalam Keluarga

1) Pengertian Anak menurut Islam

Anak merupakan titipan oleh Allah SWT yang diberikan kepada masing-masing orang tua, bagi masyarakat serta untuk negara. Hal ini telah jelas bahwa anak harus diakui, dilindungi serta diamankan untuk menerapkan amalan yang telah diberikan kepada orang tua, bagi masyarakat dan untuk negara.

2) Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Berdasarkan pada UUD 1945 pengertian anak juga dijelaskan di dalam aturan tersebut, yaitu terdapat pada Pasal 34 yang pada intinya menjelaskan bahwa, anak merupakan salah satu dari subyek hukum yang wajib untuk dilindungi, diamankan, dibimbing demi tercapainya kesejahteraan anak.³⁰

3) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak

Berdasarkan pada aturan UU Peradilan Anak, memberikan definisi bahwa dapat dikatakan sebagai anak jika masih berumur 8 tahun hingga sebelum berumur 18 tahun. Dikatakan anak juga jika belum pernah terikat dengan perkawinan sama sekali. Jika belum

³⁰ Departemen Agama RI, *UUD 1945*, Pasal 34.

berusia 18 tahun dan pernah menikah maka sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai anak.³¹

4) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam aturan UU Perkawinan, anak tidak dijelaskan secara spesifik, namun hanya menjelaskan batasan menikah bagi pria umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.³²

b. Macam-Macam Anak dalam Keluarga

1) Anak Sah

Dilihat dari aturan undang-undang perkawinan menyatakan maksud dari anak sah yaitu berasal dari hasil perkawinan sah.³³

2) Anak Tiri

Anak yang dimaksud disini adalah anak yang berasal dari orang lain tanpa ada ikatan darah sama sekali. Meskipun dalam hukum syara'nya tetap tidak dikatakan sebagai anaknya sendiri. Maka dalam hal warisan, tentunya dia berhak mendapatkan warisan dari orang tua aslinya atau yang telah melahirkannya.³⁴

3) Anak Angkat

Anak angkat dapat diartikan dalam 2 (dua) jenis yaitu, *Pertama* mengambil anak untuk diasuh dan dididik dengan perhatian yang penuh serta kasih sayang yang diberikan dengan tulus oleh yang

³¹ UU Nomor 3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Pasal 1 ayat 2.

³² UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

³³ *Ibid*, Pasal 42-43.

³⁴ Damrah Khair, *Hukum Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah, (IAIN Raden Intan: Lampung, 2011), Hal.139.

mengambilnya. *Kedua*, anak angkat yang dengan niatan untuk diakui serta diberikan status sebagai anak kandungnya dan adanya nasab sehingga memiliki hak untuk mewarisi orang tua yang mengangkatnya sebagai anak kandung.³⁵

2. Hak dan Kewajiban Anak dengan Orang Tua dalam Hukum Positif

Pada intinya hak yang didapatkan anak dari orang tua yaitu harus mendapatkan nafkah hingga dewasa atau telah menikah, begitu pula sebaliknya jika anak tersebut sudah dewasa mereka berhak untuk menjaga serta memelihara orang tua mereka disesuaikan dengan kemampuannya yang dibutuhkan.

3. Hak dan Kewajiban Anak dengan Orang Tua dalam Hukum Islam

Tanggung jawab merupakan hal yang paling utama bagi orang tua untuk mensejahterkan anak-anaknya sehingga harus membimbing dan mendidiknya hingga akhirnya dapat berkembang dan menjadi orang yang berguna di masa depannya kelak terutama selalu bertakwa pada Allah SWT. Hal ini, tentunya berdasar pada aturan hukum di Indonesia yaitu pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada intinya mengatur bahwa orang tua wajib untuk memikul tanggung jawabnya menjadi kewajiban dalam mengasuh anak-anak mereka baik secara jasmani maupun dengan rohani. Para orang tua juga berhak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya hal ini berdasar pada salah satu ayat Al-Qur'an yaitu surah Ath-Thalaq ayat 7.

³⁵ Damrah Khair, *Hukum Islam Menurut Ajaran Sunni*, hal. 143.

Begitu pula sebaliknya, jika anak telah dewasa dan mampu maka wajib baginya untuk merawat orang tuanya berdasarkan kemampuannya masing-masing.

4. Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat lambat dalam perkembangan hukum kekeluargaan.³⁶ Adanya sistem kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan dalam suatu kekeluargaan. Bahkan tidak hanya dalam keluarga namun dalam era masyarakat pun semuanya dianggap sama tanpa ada pembedanya. Kekeluargaan muncul karena berasal dari suatu perkawinan yang menjadi dasar dari corong pembangunan untuk sistem pemerintahan, demi memulai kelangsungan hidup dari kelahiran dan adanya pertumbuhan masyarakat terhadap pembangunan negara untuk jangka panjang.

5. Yurisprudensi Pembagian Waris dalam Sistem Kekeluargaan yang Berbeda Agama di Indonesia

Adanya aturan pembagian waris dalam kekeluargaan kepada keluarga yang beragama non muslim merupakan pembaharuan dari hukum waris di Indonesia. Maka muncullah kata wasiat wajibah yang merupakan yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusannya pada nomor: 51K/AG/1999.

Putusan tersebut dikeluarkan demi tercapainya kemaslahatan bagi ahli waris non muslim untuk mendapatkan kebutuhannya, sehingga

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002)

mereka juga berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan takarannya masing-masing.

Aturan ini lah yang selalu menjadi dasar yurisprudensi hakim pada perkara pembagian warisan terhadap ahli waris non muslim di Indonesia.

